

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan dalam penyelenggaraan proses penegakan hukum acara pidana dalam penegakan dan pelaksanaan masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada produk dan sistem hukum namun pada penegakan hukum tersebut. Asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocense*) merupakan salah satu asas paling dasar dalam proses peradilan pidana dan merupakan asas yang fundamental dalam perlindungan atas tersangka dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penegak hukum.<sup>1</sup>

Dewasa ini, pemberitaan di berbagai media elektronik maupun cetak didominasi oleh kasus hukum yang semakin kompleks. Berbagai peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat, publik figure dan masyarakat umum yang terjaring dalam kasus tindak pidana pencabulan, pembunuhan berencana, hoaks maupun tindak pidana lainnya, terekspos secara luas dan memosisikan mereka sebagai orang yang bersalah, terlepas dari belum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>1</sup> Rangga Sasmita. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kota Mataram)". <https://ejournal.undip.ac.id/>. Diakses pada 21 Maret 2020

Padahal dalam pasal 8 (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum butir 3c KUHP<sup>2</sup> yang mengakui dan menjamin praduga tak bersalah terhadap tersangka hingga putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut Pasal 5 ayat 1 UU Pers mengatur bahwa pers wajib memberitakan dengan menghormati norma-norma agama, kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah.<sup>3</sup> Semua orang wajib mengakui dan mengamalkan asas tersebut baik itu pengak hukum, masyarakat dan Lembaga pers.

Pada bulan Februari 2016, masyarakat di Indonesia digemparkan atas penangkapan dan penetapan status tersangka Saipul Jamil atas perbuatan pencabulan yang dilakukan Saipul Jamil kepada seorang remaja lelaki dibawah umur berinisial DS.<sup>4</sup> Atas perbuatannya Saipul Jamil yang kesehariannya adalah seorang *public figure* menjadikan media massa maupun elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai media massa<sup>5</sup>) beberapa minggu lamanya, menyiarkan terus menerus peristiwa hukum tersebut. Akibat pemberitaan terus menerus yang dilakukan oleh media, publik seolah-olah menghakimi Saipul Jamil sebagai seseorang yang bersalah. Padahal saat itu, belum ada kekuatan

---

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat 1 UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

<sup>3</sup> Ade Mudhoffar. “Mengesampingkan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Media Elektronik, Media Cetak Maupun Pandangan Masyarakat Merupakan Salah Satu Bentuk Tidak Menghargai Proses Hukum”. <https://primetimes.id/>. Diakses pada 22 Maret 2020

<sup>4</sup>.Anisyah Alfaqir. Kasus Pencabulan Saipul Jamil Divonis Tiga Tahun. <https://www.merdeka.com>. Diakses pada 22 Maret 2020

<sup>5</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media atau media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas

hukum tetap yang menyatakan Saipul Jamil bersalah, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan hakim.

Sementara itu, pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso atas Wayan Mirna Salihin (WMS) menjadi salah satu berita yang menyita perhatian masyarakat pada tahun 2016. Ditemukannya zat sianida atas es kopi Vietnam WMS yang dipesan oleh Jessica Kumala Wongso<sup>6</sup> inipun menjadi perhatian publik dan media massa beberapa minggu lamanya menyiarkan peristiwa hukum tersebut. Meskipun tidak dilakukan otopsi atas tubuh WMS namun hakim menilai CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah selama sesuai dengan keterangan saksi<sup>7</sup> Hebohnya pemberitaan kasus yang dikenal dengan “kasus kopi sianida” ini disebabkan keterlibatan kalangan masyarakat kelas elite<sup>8</sup>, selain itu merupakan cara pembunuhan baru yang jarang dilakukan di negeri ini, akibat sebab itulah media memberitakan terus menerus sekaligus untuk mengejar rating. Akibatnya media secara tidak langsung menggiring opini publik, sehingga publik seolah-olah menghakimi Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku, padahal saat itu belum adanya kekuatan hukum tetap yang menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah, akibat tekanan publik ini timbul kemungkinan perspektif publik dalam mempengaruhi putusan hakim, meskipun disisi lain berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>6</sup> .Nursita Sari, “Kaleidoskop 2016: Kopi Sianida, Mirna, dan Jessica”.  
<https://megapolitan.kompas.com>. Diakses pada 05 Mei 2020.

<sup>7</sup> .Fitri N. Heriani. “Ternyata, Beginilah Intisari Pertimbangan Hakim atas Vonis Jessica”.  
<https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 05 Mei 2020

<sup>8</sup> .Edi Sumardi “Mengapa Pembunuhan Mirna Begitu Heboh?” <https://makassar.tribunnews.com>. .  
Diakses pada 06 Mei 2020

hakim dalam mempertimbangkan putusannya memperhatikan sifat baik buruknya terdakwa.

Pemberitaan berulang-ulang yang dilakukan oleh pers baik itu elektronik maupun cetak dalam dewasa ini mengakibatkan masyarakat mengambil kesimpulan dan membuat opini tanpa filter. Tak hanya pemberitaan yang berulang-ulang, siaran langsung atau *courtroom television* atas kasus Saipul Jamil dalam pembacaan putusan dan Jessica Kumala Wongso sejak dimulainya persidangan hingga putusan tak hanya menjadi sorotan masyarakat di Indonesia saja, dunia internasional menilai bahwa lembaga peradilan di Indonesia sangat buruk.<sup>9</sup> Tak cukup disitu, atas pemberitaan yang berulang yang dilakukan oleh pers tersebut, tampak fungsi pers sebagai fungsi informasi dan kontrol sosial sekaligus penggiring opini publik. Pers disamping memiliki peran dalam pemantauan penegakan hukum yang kuat di lain pihak pers memiliki kecakapan untuk menggiring opini massa sehingga dikhawatirkan akan menciptakan vonis hukum melalui opini-opini public. Yang mana dikhawatirkan akan terjadi over publisitas sehingga timbul adanya suatu penghakiman oleh pers (*trial by the press*) yang berpotensi terjadinya *contempt of court*<sup>10</sup>

Terdapat asas keterbukaan dalam sistem peradilan pidana sebagai kaidah atau dasar dalam suatu pasal yang terkandung dalam pasal 5 ayat 1 UU Pers yang berbunyi:

Pasal 5 ayat 1 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers

---

<sup>9</sup> .Mahrus Ali, 2007. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana". Jurnal *Ius Quia Instum*, Volume 14, Nomor 2, Hal 211

<sup>10</sup> "Gerak Wartawan Selalu DIBayangi Dugaan Penghakiman dan Penghinaan". <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 07 Mei 2020.

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Dalam asas keterbukaan ini dimaksudkan agar terjadinya suatu *public hearing* dan mencegah terjadinya *secret hearing* dalam persidangan sebagai suatu kontrol sosial dalam fungsi pers. Menurut Baagir Manan “keterbukaan itu asas dalam masyarakat yang demokratis tetapi terbuka itu baru bermanfaat kalau ada ketertiban”<sup>11</sup>

Sedangkan di Inggris yang mengakui adanya hak asasi manusia (HAM) sejak abad ke 13 dengan adanya *Magna Charta* yang membatasi keabsolutan raja dan secara eksplisit mengakui adanya kebebasan pers.<sup>12</sup> Pengakuan kebebasan pers ini kemudian diatur batasan-batasan khususnya yang diatur dalam *National Union Journalist Code of Conduct* (yang dikenal dengan *NUJ Code of Conduct*). Selain pembatasan yang diatur oleh *NUJ Code of Conduct* tersebut, pers inggris juga tunduk kepada perintah pengadilan (*court order*) misalnya *court order* atas kasus perkosaan ratusan pria Inggris dimana perilsan berita tersebut sempat menggemparkan public Inggris dan Indonesia pada awal tahun 2020 yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga.

Dilansir dari BBC Indonesia yang ditulis oleh Jurnalis Endang Nurdin, pada awal tahun 2020, publik Inggris dan Indonesia digemparkan dengan berita Reynhard Sinaga, seorang pelajar asal Indonesia yang sedang menempuh Doktor atau S3 di Inggris atas 190 kasus perkosaan dengan rentang waktu 2,5 tahun,

---

<sup>11</sup> Vidya Prahassaccitta. “Keterbukaan dan *Fair Trial* dalam Siaran Langsung Persidangan Pidana”. <https://business-law.binus.ac.id>. Diakses pada 24 Maret 2020

<sup>12</sup> Aswab Nanda Pratama. “Hari HAM Sedunia, Perjalanan dari Magna Carta hingga Deklarasi Universal PBB” <https://internasional.kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2020.

sejak ditangkap pada Juni 2017 sampai Desember 2019. Persidangan kasus Reynhard Sinaga yang berlangsung sejak Juni 2018 berlangsung tanpa pemberitahuan media, dan media baru serentaj memberitakan usai dijatuhkannya putusan yang dibacakan pada 6 Januari 2020.<sup>13</sup>

Pelarangan sementara dalam hal publikasi oleh media yang dilakukan oleh hakim Smith yang diubah oleh hakim Suzanne Goddard sejak 24 November 2017 atas pemberitaan kasus Reynhard Sinaga ini sebelum putusan resmi dibacakan,<sup>14</sup> menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, utamanya terkait dengan asas peradilan terbuka untuk umum yang selama ini melekat pada peradilan pidana, serta asas kebebasan pers.

Adanya perbedaan yang signifikan dalam keterkaitan pers dalam proses peradilan pidana yang terjadi antara Indonesia dan Inggris menarik bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam karya tulis ini. Terlebih penulis belum menemukan penelitian terkait perbandingan kebebasan pers antara Indonesia dan Inggris sebelumnya di berbagai penelitian di Indonesia secara umum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang secara khusus.

Dalam karya tulis ini, penulis akan melakukan penelaahan hukum mengenai kebebasan Pers dalam proses peradilan pidana antara Indonesia dan Inggris, yang akan dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui tinjauan pustaka hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum Inggris. Bab II akan mengulas mengenai tinjauan

---

<sup>13</sup> Raja Eben Lumbanrau. "Reynhard Sinaga: Menjaga kerahasiaan proses persidangan di Inggris". <https://www.bbc.com>. Diakses pada 12 Januari 2020.

<sup>14</sup> Ibid

teoritis terkait sistem hukum, kebebasan pers, proses peradilan pidana antara Indonesia dan Inggris. Lebih lanjut, Bab III akan mengupas mengenai kedudukan pers dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Inggris, dan hubungan asas kebebasan pers dan praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana, sehingga pada Bab IV dapat dicapai kesimpulan mengenai kebebasan pers dalam proses peradilan pidana Indonesia dan Inggris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini mengangkat rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan pers, hakim dan juri dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Inggris?
2. Bagaimana hubungan asas kebebasan pers dan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan pers, hakim dan juri dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Inggris.
2. Untuk mengetahui hubungan asas kebebasan pers dan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi para akademisi, penegak hukum, maupun lembaga terkait sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, serta pengembangan hukum media massa dan hukum pidana pada khususnya dalam hal aturan mengenai kebebasan pers dalam proses perbandingan apabila ditinjau dari sudut hukum Indonesia dan Inggris.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk Penulis

Penulisan ini dapat memberikan wawasan dan ilmu baru terhadap penulis terkait dengan judul Analisa Hukum Kebebasan Pers dalam Publikasi Proses Peradilan Pidana antara Indonesia dan Inggris. Serta penulisan ini dipandang dari sudut subyektif sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam menempuh Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang demi mendapat gelar Sarjana Hukum.

### b. Untuk Mahasiswa

Penulisan ini dapat memberikan wawasan dan ilmu baru terkait dengan Analisa Hukum Kebebasan Pers dalam Publikasi Proses Peradilan Pidana Perbandingan Hukum Indonesia dan Inggris

### c. Untuk Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan selang pandang terkait dengan Analisa Hukum Kebebasan Pers dalam Publikasi Proses Peradilan Pidana antara Indonesia dan Inggris, dalam penerapannya di Indonesia, sehingga aturan tersebut di Indonesia dapat berkembang dan tercapainya tujuan hukum yang diinginkan.



d. Untuk Insan Pers

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu memberikan selang pandang dan mengedukasi insan pers terutama di Indonesia, terkait pedoman, aturan, perbandingan serta dampak dalam hal penyampaian publikasi proses peradilan pada khususnya dan berita pada umumnya.

**E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hakim sebagai pemimpin jalannya persidangan dalam hal pembatasan publikasi dalam proses peradilan, dan kepada pemerintah terutama lembaga legislative dalam hal pembuatan aturan terkait publikasi dalam proses peradilan.

**F. Metode Penelitian**

**1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi acuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan studi terhadap hukum, Indonesia dan Inggris.

**2. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>15</sup> Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang paling relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **3. Jenis bahan hukum**

Jenis bahan hukum yang diunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum pokok yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang berasal dari hukum positif/peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan, informasi, atau hal-hal lain yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, Glossay, dan lain-lain

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan arahan dan gambaran secara sistematis, sistematika dalam penulisan tugas akhir ini disusun secara runtut dan dibagi ke dalam 4 (empat) bab dengan susunan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Peter, Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. Hal 93

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang memberikan batasan pertanyaan dalam penelitian ini, tujuan, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir serta originalitas.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan mengenai tinjauan umum perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Inggris, hukum acara pidana Indonesia dan Inggris, asas peradilan terbuka untuk umum di Indonesia dan Inggris serta aturan publikasi.

## **Bab III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai aturan terkait publikasi dalam proses peradilan, asas peradilan terbuka untuk umum, kebebasan pers, kewenangan pengadilan dalam pembatasan publikasi serta *court order* dalam kasus Reynhard sebagai contoh.

## **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir. Bagian ini menguraikan terkait kesimpulan seluruh pembahasan yang dijabarkan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan. Selain itu, disertakan saran dari peneliti terhadap pihak terkait atas tela'ah yuridis normatif kebebasan pers dalam publikasi proses peradilan perbandingan Indonesia dan Inggris.

## H. Originalitas

Sebelum penulisan ini, telah ada penulisan terkait yakni:

**Tabel 1. Penulisan terdahulu.**

No	Nama Penulis	Tahun	Judul
1	Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih	2018	Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media
2	Adibah Oktavia	2020	Trial by the Press dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual dengan Korban Anak
3	Vivi Ariyanti	2010	Kebebasan Pers dalam Perpektif Peradilan Pidana